

 KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 FINAL/TIDAK FINAL		1721-B1
	H.1	NOMOR : 2000001391	H.4 <input checked="" type="checkbox"/> Final
	H.2 <input checked="" type="checkbox"/> Pembetulan Ke- 0	H.3 <input type="checkbox"/> Pembatalan	H.5 <input type="checkbox"/> Tidak Final

A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG

A.1 NPWP :	3517254722000
A.2 NIK :	
A.3 Nama :	SYAFRUDDIN


B. PPh PASAL 21 YANG DIPOTONG

MASA PAJAK (mm-yyyy)	KODE OBJEK PAJAK	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp)	DASAR PENGENAAN PAJAK (Rp)	TARIF LEBIH TINGGI 20% (TIDAK BER- NPWP)	TARIF (%)	PPh DIPOTONG/DTP (Rp)
B.1	B.2	B.3	B.4	B.5	B.6	B.7
4	21-402-01	954.700	954.700	0	5	47.735

Keterangan Kode Objek Pajak : Honor dan Imbalan Lain yang Dibebankan kepada APBN atau APBD yang Diterima oleh PNS, Anggota

B.8	Dokumen Referensi :	Nomor Dokumen	037/SP2D-LS/BLUD-RSJDHMH/IV/2022				
		Nama Dokumen	Biaya Pembayaran	Tanggal	13 dd	04 mm	2022 yyyy
B.9	<input type="checkbox"/>	PPh Pasal 21 dibebaskan dari pemotongan berdasarkan Surat Keterangan Bebas (SKB). Pembebasan ini berdasarkan SKB.					
		Nomor :		Tanggal			
B.10	<input type="checkbox"/>	PPh Pasal 21 ditanggung oleh Pemerintah (DTP) berdasarkan :					
B.11	<input type="checkbox"/>	PPh yang dipotong/dipungut yang diberikan fasilitas PPh berdasarkan :					

C. IDENTITAS PEMOTONG PAJAK

C.1	NPWP Instansi Pemerintah :	953350162722000				
C.2	Nama Instansi Pemerintah :	RUMAH SAKIT JIWA DAERAH ATMA HUSADA MAHAKAM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR				
C.3	ID Subunit Organisasi :					
C.4	Tanggal :	13 dd	04 mm	2022 yyyy		
C.5	Nama Penandatangan :	HARI JUMADI				
C.6	Pernyataan Wajib Pajak :	Dengan ini saya menyatakan bahwa bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi telah saya isi dengan benar dan telah saya tandatangi secara elektronik.				
		<div><div>KDWEG17R</div></div>				